

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian melalui literatur-literatur yang ada, yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni mengenai Pemikiran Teungku Daud Beureueh Tentang Negara dan Pemerintahan Indonesia mulai 1953-1965, memetakan kronologi sejarah terbentuknya Darul Islam Aceh, serta menemukan latar belakang dan faktor penyebab terjadinya konflik di Aceh, maka dapat disimpulkan bahwa kemunculan konflik ini dapat dianalisis bahwa sebenarnya terjadi kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara pemerintah pusat dan daerah.

Konflik ini merupakan ketidakadilan yang dirasakan rakyat Aceh terhadap pemerintah pusat yang yang dirasa kurang memperhatikan kesejahteraan dan keinginan rakyat Aceh, padahal yang kita ketahui pada awal kemerdekaan Indonesia, Aceh banyak memberikan dukungan moril dan ekonomi. Rakyat Aceh di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh, sepakat mengumpulkan dana demi perjuangan dan berperan aktif untuk tetap menjaga keutuhan tanah air. Melihat besarnya sumbangan rakyat Aceh, Presiden Soekarno menjuluki Aceh sebagai daerah modal dan menjanjikan diterapkannya syariat Islam di Aceh. Ternyata di kemudian hari Aceh tidak diberi otonomi dengan penerapan syariat Islam seperti yang telah dijanjikan, bahkan sebaliknya Aceh kemudian dimasukkan ke dalam Provinsi Sumatera Utara dan Daud Beureueh disingkirkan dari Pemerintahan. Kekecewaan ini menghasilkan pemberontakan di tahun 1953.

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Pusat dengan Darul Islam memakan waktu yang relatif lama, sehingga dalam menangani pergolakan di Aceh, pemerintah menetapkan

pembentukan kembali Provinsi Aceh. Pengembalian status provinsi dan komando militer menghidupkan lagi harapan rakyat Aceh, dan membuat para pemimpin baru dipandang sebagai pahlawan sejati.

Sejalan dengan itu pemberian status otonomi saja belum mempunyai dampak yang berarti untuk menghentikan pergolakan DI/TII. Oleh karena itu melalui Gubernur Ali Hasjmy, melakukan pendekatan terhadap DI/TII agar mau berdamai dengan Republik Indonesia. Akhirnya dengan pendekatan yang dilakukan Gubernur Ali Hasjmy, kelompok DI/TII yang berhaluan moderat atau yang di kenal dengan "Dewan Revolusi" setuju untuk berdamai dengan pemerintah pusat dengan ketentuan memberlakukan syariat Islam di Aceh sesuai dengan keputusan Perdana Menteri No. I/Missi/1959.

## **5.2 Saran**

Penelitian ini hanya sebuah karya sederhana dan jauh dari kesempurnaan, bagi penulis yang ingin meneruskan penelitian ini disarankan melakukan wawancara dengan pihak tertentu yang terkait dengan kejadian pada waktu itu maupun pakar sejarah yang paham dengan kejadian DI/TII.

